SELURUH BIDANG TANAH BERHASIL TERPETAKAN

Yogya Jadi Kota Lengkap Keenam di Indonesia

YOGYA (KR) - Kota Yogya berhasil ditetapkan sebagai Kota Lengkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto. Pencanangan tersebut merupakan yang keenam di Indonesia setelah Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal dan Surakarta.

Pencanangan Yogya sebagai Kota Lengkap telah dilakukan Kamis (11/5) lalu. Yogya dinilai telah memenuhi beberapa unsur seperti seluruh bidang tanah berhasil terpetakan serta dilengkapi validitas dokumen spasial dan yuridis. Terutama baik buku tanah maupun surat ukur di dalam sertipikat milik masyarakat, secara spasial dan yuridis sudah memenuhi syarat. "Secara spasial apabila tanah itu tidak ada gap atau renggang dan tidak tumpang tindih. Secara yuridis, baik itu buku tanah dan surat ukur apabila diunggah secara elektronik, data fisik dan data yuridisnya akurat," jelas Hadi Tjahjanto.

Menurutnya banyak keuntungan dengan menjadi Kota Lengkap yakni masyarakat memiliki hak atas tanah yang melekat pada diri pribadi. Dari hak atas tanah itu juga memiliki nilai ekonomi dan sosial. Dicontohkan jika ada pelaku UMKM yang kekurangan modal maka bisa menggunakan sertipikat tanah sebagai agunan dalam mengakses permodalan di perbankan. Selain itu juga tidak akan ada lagi permasalahan sengketa tumpang tindih tanah masyarakat karena semua terdata dengan akurat. "Menutup ruang bagi mafia tanah karena semua sudah masuk dalam data. Apabila ada investor maka sudah dijamin kepastian hukum untuk berusaha berkaitan kepemilikan tanah," imbuhnya.

Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya, menilai dengan deklarasi Kota Yogya sebagai Kota Lengkap artinya secara teknis spasial dan yuridis sudah mendapatkan jaminan. Menurutnya, bagi kepentingan pemerintah ada kepastian menyangkut barang milik daerah, dan bagi kepentingan masyarakat adalah pengembangan investasi dan keekonomian riil. "Dengan demikian sertipikasi tanah di Kota Yogya dapat dikatakan sertipikat yang mantap dan bebas dari konflik. Insya Allah manfaatnya sangat besar bagi Pemkot dan masyarakat dalam pengembangan dunia usaha dan investasi," jelasnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Suwito, menyebut sampai saat ini jumlah bidang tanah bersertipikat di Kota Yogya sebanyak 89.151 bidang tanah dari total sekitar 98.000 bidang. Dari jumlah bidang tanah yang bersertipikat itu, data yang siap elektronik sebanyak 86.654 bidang tanah atau sekitar 98 persen. **(Dhi)-f**

Dr Tugiman Mendaftar Calon Anggota DPD RI

YOGYA (KR) - Dr H Tugiman SH MSi resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DIY pada Pemilu 2024 di kantor KPU DIY, Jumat (12/5). Tugiman bersama tim pendukung datang ke KPU DIY dengan mengenakan busana adat Yogyakarta.

Disinggung alasan mengenakan busana adat Yogyakarta, Tugiman menuturkan bahwa filosofi Pemilu adalah pesta demokrasi, di mana masyarakat bergembira, bebas memilih dengan tetap dalam suasana guyup rukun. "Beda pilihan politik adalah hal yang manusiawi, sekaligus merupakan manifestasi demokrasi yang baik dan sehat," katanya.

Selain itu, menurut Tugiman, Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya ditambah lagi dengan status sebagai daerah istimewa. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi warganya untuk melestarikan budayanya. Hal itu pula yang menjadi ranah dan kewenangan DPD RI. "Sehingga nanti kita akan berupaya di lembaga DPD RI untuk mendukung dan memajukan DIY terutama dari aspek budaya, ekonomi, dan aspek lainnya," ujarnya.

Dijelaskan Tugiman, untuk memajukan DIY, setidaknya dapat ditempuh dalam tiga cara, yaitu adanya dukungan regulasi, kebijakan, dan dukungan anggaran. "Ini menjadi tantangan bagi saya dan kita semua untuk memperjuangkan melalui lembaga DPD RI, terutama soal alokasi anggaran, supaya dana keistimewaan DIY ditingkatkan lagi, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat DIY, namun tetap diawasi agar tepat sasaran, " tuturnya.

Disinggung mengenai progres mesin politik (tim pendukung), menurut Tugiman, timnya sudah bekerja maksimal dan terus bergerak menyosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, agar target kemenangan bisa tercapai. "Bagi saya rival terberat tidak ada, hanya saya berharap bisa membersamai Bu Ratu (GKR Hemas) di DPD RI. Sedangkan terhadap calon yang lain, saya memandangnya sama, yang terpenting bergembira, senang-senang di Pemilu 2024 dan tetap guyup rukun," katanya.

Dengan latar belakang militer, sekaligus akademisi, penggiat olahraga dan aktivis sosial budaya, Tugiman terbiasa berpola pikir secara sistematis serta berkarakter untuk memenangkan setiap persaingan. Karakter ini tentu akan berbeda pada masing-masing calon yang berkontestasi. "Perbedaan ini akan menjadi khasanah, dan masyarakat akan menentukan pilihan terbaiknya," pungkasnya. **(Dev)-f**

KR-Devid Permana

Dr Tugiman (kiri) didampingi tim pendukung menerima berita acara pendaftaran.

DPR Dukung BUMN Kembangkan Pembiayaan Rumah Rakyat

SLEMAN (KR) - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menyebut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) semakin kuat dalam mengawal program sejuta rumah sebagai program kerja Pemerintahan Jokowi. Performa bank BUMN itu dinilai bagus karena sekaligus menjadi solusi pembiayaan rumah rakyat.

"Sebagai mitra Komisi VI, saya mendukung Bank BTN bisa lebih besar membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Subardi saat Sosialisasi BUMN dengan tema 'Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan' di Seyegan, Sleman, Kamis (11/5).

Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.

"Sektor properti memberi dampak langsung pada 174 sektor turunannya. Kami mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi," tandasnya.

KR-Istimewa

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi saat sosialisasi BUMN.

Dalam hubungan kemitraan tersebut, Subardi mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Peran BUMN seperti Bank BTN juga perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

Ketua NasDem DIY itu menyebut, peluang bisnis pembangunan perumahan sangat potensial. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga muda (kelompok usia milenial) yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan," terangnya.

Saat ini terdapat backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat sebanyak 12,7 juta unit. Kondisi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Komisi VI DPR. **(*)-f**

PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORMAS DIY OLEH BADAN KESBANGPOL DIY

Pemilu, Hari 'Kasih' Suara untuk Masa Depan Bangsa

KR-Istimewa

Aswino Wardha, Bagas Senoadji ATD MT, Hendri Harjanto dan Sudaryanto

SLEMAN (KR) - Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 14 Februari 2024, atau bertepatan hari kasih sayang. Memanfaatkan momentum itu, maka hari tersebut, merupakan hari kasih suara untuk kepentingan masa dengan negara.

"Hari kasih suara menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa," ujar Anggota Komisi A DPRD DIY, Sudaryanto dalam Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan DIY, Kamis (11/5) di Hotel Ramada Wyndham, Jalan Magelang KM 14, Sleman.

Selain Sudaryanto, hadir sebagai pembicara, Komisioner KPU Sleman Aswino Wardhana, Praktisi Komunikasi dari Migunanti Learning Centre, Hendri Harjanto dan dilengkapi motivator Phinastika Manuswara, Kisdi Triyanto SSi. Kegiatan dibuka oleh Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Bagas Senoadji, ATD MT.

Menurut Sudaryanto, agar pemberian suara sesuai dengan hati nurani, maka proses Pemilu diharapkan berjalan baik, tidak ada hoax dan pengembangan politik identitas.

Bagas Senoadji mengungkapkan tujuan dari pelaksanaan pendidikan politik yang digelar Badan Kesbangpol DIY, agar masyarakat mengetahui pelaksanaan Pemilu 2024. Diharapkan partisipasi masyarakat bisa lebih baik dari sebelumnya.

Hendri mengakui bahwa penyebaran hoax melalui media digital dapat mengancam pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang baik. Termasuk di antaranya menyudutkan orang atau pihak tertentu yang menjadi peserta Pemilu.

Karena itu, Hendri mengingatkan kepada peserta pelatihan untuk hati-hati menerima pesan dari media sosial, seperti WA. Agar tidak asal membagikan kepada yang lain. "Hati-hati membaca berita yang bombastis dan menimbulkan kebencian, memojokkan dan dari sumber yang tak jelas," ujar Hendri.

Menurutnya, mungkin maksudnya baik untuk berbagi info, tetapi niat baik bisa berdampak buruk jika tidak hati-hati membacanya.

Aswino Wardhana mengungkapkan bahwa KPU Sleman terus berupaya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu meningkat. Karena itu berbagai sosialisasi terus dilakukan. Termasuk juga melakukan pendataan Pemilih, agar tidak ada warga yang terlewat untuk memberikan hak suara.

Demikian pula para mahasiswa dari luar daerah, terus diupayakan untuk difasilitasi. Termasuk bekerjasama dengan kampus. (*)-f

KR-Istimewa

Peserta saat menyampaikan pertanyaan

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

DARURAT SAMPAH BUKAN ISU BARU

Urai Masalah, Butuh Peran Lintas Daerah

SIGIT WICAKSONO
Fraksi Partai NasDem

KR-Istimewa

YOGYA (KR) - Permasalahan darurat sampah yang ada di Kota Yogya maupun DIY sebenarnya bukan merupakan isu baru. Masalah itu sebenarnya sudah dirasakan sejak beberapa tahun lalu. Untuk mengurai masalah tersebut pun dibutuhkan peran lintas daerah di lingkup DIY.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, menuturkan jika penanganannya dilakukan secara parsial maka masalah sampah tidak akan pernah selesai. "Itu akan selalu berulang. Kota Yogya tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Aktivitas masyarakat sudah menyebar tanpa ada batas wilayah," tandasnya.

Oleh karena itu butuh keseragaman dalam menjalankan aksi penanganan sampah. Terutama adanya kesepakatan bersama bahkan regulasi di tingkat DIY yang bisa menjadi pedoman bagi daerah. Pasalnya daerah tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Apalagi Kota Yogya serta Kabupaten Kulonprogo yang kepala daerahnya diisi oleh penjabat dan akan segera memasuki masa pensiun sehingga cenderung memilih 'zona nyaman'. "DIY lebih beruntung karena Sultan merupakan gubernur. Sehingga bisa lebih kuat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sigit mengungkapkan Kota Yogya sudah menggulirkan gerakan zero sampah anorganik dan akan dilanjutkan dengan zero sampah organik. Selain itu juga tengah berupaya mencari lahan untuk mengolah sampah jenis residu. Kendati program tersebut cukup bagus namun tanpa diimbangi dengan gerakan serupa di kabupaten lain maka hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan darurat sampah juga berpeluang kembali terjadi.

Lain halnya jika ada peran lintas daerah yang difasilitasi oleh provinsi, maka harapannya penanganan sampah tidak lagi parsial. Jika hanya diserahkan ke masing-masing daerah, tidak menutup kemungkinan justru akan menumbuhkan egosentris masing-masing. "Teknologi untuk penanganan sampah kan cukup banyak. Bisa ditentukan bersama mana yang paling efektif. Anggaran besar bukan persoalan karena bisa dicukupi bersama. Apalagi persoalan sampah ini kan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Tidak ada yang mau jika di dekat rumahnya jadi tempat pembuangan. Mindsetnya adalah diolah, gunakan teknologi berkelanjutan," paparnya. **(Dhi)-f**